



Efek Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024

Naufal Azmi¹, Alamsyah Alamsyah²

^{1,2} Faculty of Social and Political Science, Sriwijaya University, Palembang, Indonesia

Abstract

Sustainable development has become a primary focus in improving societal well-being in various countries, including Indonesia. One of the key indicators for measuring development quality is the Human Development Index (HDI), which reflects the levels of health, education, and economic welfare in a region. However, in South Sumatra Province, HDI still faces significant challenges, particularly concerning poverty rates and the Open Unemployment Rate (OUR). High poverty levels and fluctuating unemployment rates contribute to social and economic disparities in the region. In the context of development, the Sustainable Development Goals (SDGs) serve as a global framework aimed at reducing poverty, social inequality, and ensuring sustainable development. One of the main indicators within the SDGs is poverty reduction and economic welfare improvement. Data from BPS South Sumatra indicates that the poverty rate in this province ranges from 5% to 20%, with North Musi Rawas Regency recording the highest poverty rate in 2024 at 17.38%. Meanwhile, the OUR in South Sumatra also exhibits significant variations, with Palembang City recording the highest rate at 7.49% and South Ogan Komering Ilir Regency the lowest at 1.81% in 2023. This study aims to analyze the influence of poverty levels and OUR on HDI in South Sumatra Province for the period 2017–2024. Using a quantitative approach, this research is expected to provide a deeper understanding of the relationship between these three variables and offer policy recommendations for the government in its efforts to reduce poverty and improve public welfare.

Keywords: Development; Sustainable Development Goals (SDGs); poverty; open unemployment rate; Human Development Index (HDI)

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Namun, di Provinsi Sumatera Selatan, IPM masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kemiskinan yang tinggi serta angka pengangguran yang fluktuatif berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah ini. Dalam konteks pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka kerja global yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam SDGs adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Data dari BPS Sumatera Selatan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini berkisar antara 5% hingga 20%, dengan Kabupaten Musi Rawas Utara mencatat tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 17,38%. Sementara itu, TPT di Sumatera Selatan juga menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Kota Palembang mencatat TPT tertinggi sebesar 7,49% dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan mencatat angka terendah sebesar 1,81% pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan TPT terhadap IPM di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2017-2024. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

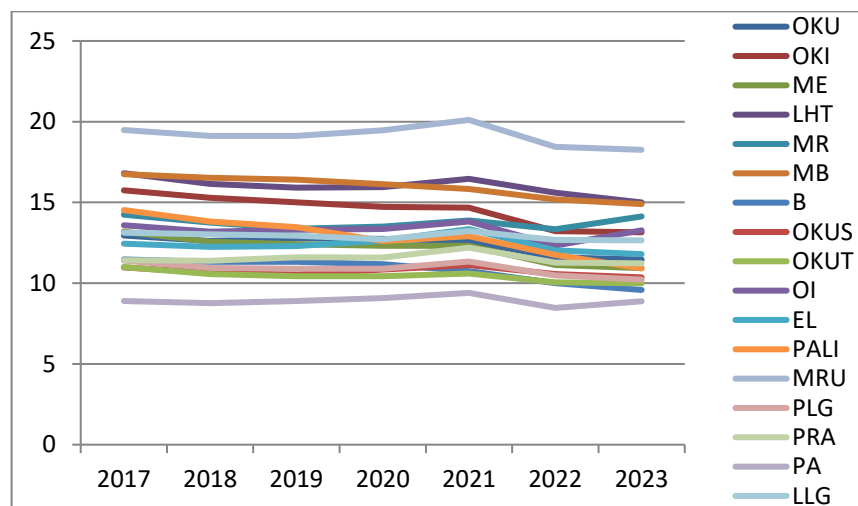
Kata Kunci: Pembangunan; Sustainable Development Goals (SDGs); kemiskinan; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pendahuluan

Di masa depan nanti, para masyarakat tentu akan menghadapi berbagai macam perubahan dikarenakan kemajuan yang dibuat oleh para perencana pembangunan sebelumnya. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan pendidikan yang berkualitas serta akses globalisasi yang mudah. Pembangunan sendiri merupakan usaha terencana dan terarah untuk mengadakan pertumbuhan dan perubahan, dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh bangsa, pemerintah dan negara sebagai bentuk partisipasi untuk bangsa agar tercapainya perubahan (Lubis & Wahyudi, 2023). Dalam pembangunan sendiri, terdapat istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, istilah tersebut adalah “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. SDGs sendiri merupakan bagian awal yang dibuat untuk tahun 2030 agar pembangunan berkelanjutan bisa menyelesaikan masalah pemanasan global, kemiskinan, ketimpangan iklim, degradasi lingkungan dan keadilan.

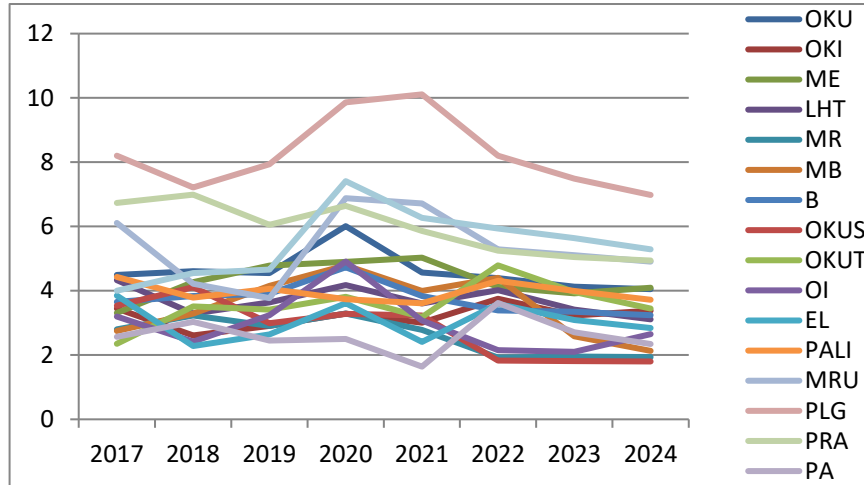
Provinsi Sumatera Selatan sendiri tidak bisa juga terlepas dari masalah dalam pembangunan, seperti dalam pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran. Ketiga permasalahan ini sendiri memiliki hubungan yang erat dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan secara komprehensif. Dalam menentukan seberapa besar indikator pembangunan di suatu daerah atau negara, ada banyak sekali perdebatan didalamnya, masalah ini muncul dari sifat pembangunan yang rumit, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah tertentu mungkin berfokus terutama pada faktor ekonomi, sementara yang lain memprioritaskan masalah sosial, di antara faktor-faktor lainnya, ini juga tergantung dari sejarah, budaya dan sosial yang berbeda di setiap tempat.

Distribusi kemiskinan yang tidak merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, yang digambarkan dalam Grafik 2, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan bervariasi di berbagai wilayah di provinsi tersebut. Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan berfluktuasi antara 5% dan 20%. Jika dilihat di grafik 1.1 angkanya cenderung menurun setiap tahun, untuk tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2024 berada di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 17,38% sedangkan untuk terendahnya ada di Kota Pagar Alam dengan nilai 8,18%, ini menurun setiap tahunnya dimana Musi Rawas Utara tetap berada pada provinsi tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 18,26% dan Pagar Alam tetap menjadi yang terendah yaitu sebesar 8,88%. Dalam hal ini bisa kita lihat ada ketidakmerataan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.



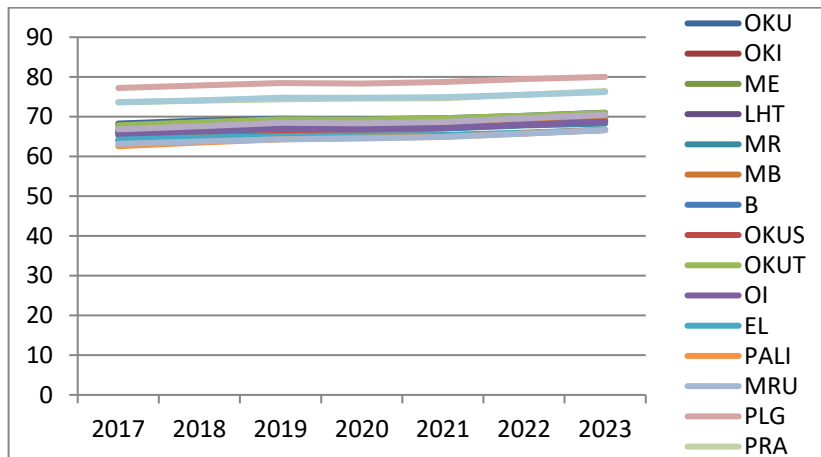
Sumber : BPS Sumatera Selatan (2025)

Ada banyak sekali jenis pengangguran, salah satunya adalah pengangguran terbuka, dimana pengangguran terbuka mengacu pada segmen angkatan kerja yang menganggur atau sedang aktif mencari pekerjaan. (Ardian dkk., 2022) Tingkat pengangguran terbuka merupakan masalah yang perlu ditangani untuk memenuhi tujuan SDGs. dimana ada misi utama SDG yang berjudul “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” difokuskan pada pengembangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, memastikan kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi semua orang, dan mempromosikan inovasi dan kewirausahaan. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup beragam, dimana ketika tahun 2023, Kota Palembang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yaitu sebesar 7,49%, sedangkan untuk angka terendah berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan dimana angkanya sebesar 1,81%.



Sumber : BPS Sumatera Selatan (2025)

Provinsi Sumatera Selatan sendiri menghitung pembangunan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM tersebut merupakan salah satu strategi menurunkan kemiskinan, dari grafik 1 bisa kita lihat bahwa IPM tertinggi pada tahun 2023 berada di Kota Palembang sebesar 80,02%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana nilai tahun 2022 sebesar 79,47%. lalu untuk Kota Prabumulih berada pada peringkat kedua dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,46%. disusul dengan peringkat ketiga yaitu Kota Lubuklinggau sebesar 76,19%. Sedangkan untuk yang terendah ada Kabupaten musi Rawas Utara dengan nilai 66,6%, meskipun sebenarnya angka tersebut merupakan angka terkecil di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2022, IPM untuk kabupaten Musi Rawas Utara naik menjadi 65,74%. lalu peringkat terendah kedua yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan nilai 66,64%. lalu untuk terendah ketiga yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan nilai 66,67%. ini menunjukkan masih banyaknya ketimpangan dalam IPM.



Sumber : BPS Sumatera Selatan (2025)

Masalah kemiskinan sebenarnya masih berkaitan erat dengan seberapa banyak penduduk dan ada tidaknya lapangan kerja untuk mereka semua, jika masih sedikit lapangan kerja yang tersedia, akan menimbulkan pengangguran yang mengarah pada munculnya kemiskinan. Selain pengangguran, kualitas hidup masyarakat sepertinya menjadi faktor yang menghasilkan kemiskinan, Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena hal tersebut memengaruhi hasil pendidikan dan kesehatan, yang hal tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan kepada masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan (Maulana dkk., 2022; Ristika dkk., 2021).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan, lalu penyebab mengapa masyarakat menjadi miskin sendiri karena adanya budaya kemiskinan seperti apatis, menggantungkan diri pada nasib, tak bisa mengatur keuangan, kurangnya literasi dan kurang memiliki semangat untuk membangun masa depan mereka sendiri. Kemiskinan merupakan masalah klasik dalam pembangunan. Paradigma dari kemiskinan sendiri akan banyak dan akan terus menjadi masalah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup yaitu kebutuhan dasar minimal mereka sendiri.

Kemiskinan merupakan persoalan individu masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena rendahnya upah yang didapat kurang cukup atau kualitas sumber daya yang dimiliki rendah (Y. A. Sari, 2021). Permasalahan kemiskinan sendiri sebenarnya telah ada bersamaan dengan permasalahan kemanusiaan itu sendiri dan dampak permasalahannya bisa terkena di berbagai macam aspek kehidupan, walau kadang dampaknya tidak disadari oleh manusia. Mereka sendiri yang termasuk golongan miskin, merasakan dengan benar-benar sadar karena itu sudah termasuk bagian dari hidup mereka sehari-hari (Chairunnisa & Qintharah, 2022). Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan distribusi pendapatan dan adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan sendiri memiliki 2 pandangan, yaitu yang pertama yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan pokok dan tingkat pendapatan bagi seseorang untuk mendapatkan hidup yang layak (kemiskinan absolut) dan yang kedua yaitu kemiskinan yang muncul karena adanya ketimpangan sosial, yaitu mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya namun masih dibawah batas kemiskinan di daerah tersebut (Susanto & Pangesti, 2021). Kemiskinan yang semakin meningkat dan menyebar merupakan inti dari semua masalah pembangunan (L. S. Hasibuan, 2023). Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dasar yang menjadi perhatian seluruh pemerintah dunia, karena kemiskinan memiliki dimensi dan tantangan yang luas dalam tingkat global (Rachmatullah dkk., 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri memiliki 3 indikator dalam kemiskinan. Yang pertama Head Count Index (HCI-P0), yaitu presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan, yang kedua yaitu Poverty Gap Indeks-1 yaitu indeks tentang seberapa dalamnya kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika indeksnya rendah maka akan semakin dekat dengan rata-rata pengeluaran penduduk dan garis kemiskinan. Yang terakhir yaitu Poverty Severiti Index-p2 yaitu seberapa parahnya kemiskinan yang memberikan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator kemiskinan menurut BPS Provinsi Sumatera Selatan sendiri adalah yang tingkat konsumsinya dibawah Rp.554.197/kapita/bulan. Adapun rumus yang menghitung tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$P^0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(z - \frac{y_i}{z} \right)_0$$

Sumber : (Nur dkk., 2022)

P_0 = Tingkat Kemiskinan

$0 = \alpha$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki kapasitas untuk memperoleh pekerjaan karena beberapa sebab seperti terbatasnya lapangan pekerjaan atau kualitas masyarakat tersebut tidak cukup untuk mendapatkan sebuah pekerjaan (Kiha dkk., 2021). Pengangguran tidak bisa digampangkan karena pengangguran merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi (Pasaribu dkk., 2022). Dengan adanya adanya pengangguran, akan menjadi permasalahan bagi Indonesia, kualitas dan upah yang didapat oleh masyarakat akan berkurang (Marliana, 2022). Pengangguran merupakan masalah yang meluas dalam pembangunan yang dihadapi oleh

banyak negara, termasuk Indonesia yang tergolong negara berkembang. Badan Pusat Statistik (2020) mendefinisikan “pengangguran sebagai individu dalam kelompok usia kerja (15-64 tahun) yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil”.

Proses yang meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara disebut pembangunan ekonomi. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan dan meningkatkan sumber daya manusia, serta untuk menciptakan lapangan kerja yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Namun, masalah dalam penyediaan lapangan kerja seringkali muncul ketika jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah angkatan kerja yang ada, menyebabkan pengangguran (Veronika & A. Y., 2022).

Pengangguran adalah masalah yang serius, jika tidak ditangani dengan baik maka tentunya ada dampak negatif bagi suatu daerah, seperti kemiskinan dan kriminalitas. Contoh Faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang mengakibatkan masuknya pekerja baru secara terus-menerus ke pasar kerja setiap tahunnya, sehingga memengaruhi tingkat pengangguran. (Eka Fatimah dkk., 2024) Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menciptakan program yang diharapkan untuk memberantas pengangguran di Indonesia, yaitu Program Tunjangan Kerja management (TKM), dimana inisiatif ini memainkan peran penting dalam menekan pengangguran di Indonesia dengan mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMKM), yang merupakan pemberi kerja utama di negara ini (Kesumadewi & Aprilyani, 2024). Salah satu jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka mencakup semua anggota angkatan kerja, baik yang baru maupun yang sudah ada, yang secara aktif mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung menggunakan komponen-komponen berikut;

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Dimana :

TPT : tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP : Jumlah Pengguran (Jiwa)

PAK : Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Di tahun 1990 organisasi PBB yang bergelut di bidang pembangunan yaitu UNDP (United Nations Development Programme) menunjukkan konsep dari “Pembangunan manusia. Dalam konsep pembangunan manusia yang dirilis oleh UNDP tersebut, muncullah konsep baru yaitu Indeks Pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan Indikator penting untuk melihat dampak upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup di suatu daerah (Ramadhani & Utomo, 2023). United Nation Development Programme (UNDP) memperkenalkan metrik baru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang telah menjadi indikator umum di banyak negara di dunia, berdasarkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh UI Haq. IPM mengukur kemajuan pembangunan suatu wilayah melalui tiga aspek utama kualitas hidup: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun IPM terkadang bisa mengalami ketimpangan dalam pengukurannya, tetapi IPM adalah salah satu indikator pembangunan yang berguna dan dipakai secara universal (Abda & Cahyono, 2022; B. F. Maulana dkk., 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri mencakup dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang mana dimensi tersebut merupakan komponen Sustainable Development Goals (SDGs) (Gaza dkk., 2024).

Rumus dalam Mengukur Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut (Faelassuffa & Yuliani, 2022):

$$IPM = \frac{1}{3} \{X(1) + X(2) + X(3)\}$$

Dimana:

X(1) : Indeks Kesehatan

X(2) : Indeks Pendidikan

X(3) : Indeks Standar Hidup

Dalam rumus ini, nilai-nilai dari tiga dimensi utama diwakili oleh X(1), X(2), dan X(3), X(1): Dimensi Pendidikan diwakili oleh angka harapan hidup, yang menunjukkan tingkat kesehatan dan umur panjang orang. X(2): Dimensi Pendidikan diwakili oleh dua indikator, rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), yang menunjukkan kualitas pendidikan dan akses ke sekolah. Diwakili oleh pendapatan per kapita yang disesuaikan,

dimensi standar hidup layak X(3) mencerminkan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rumus ini memberikan bobot 1/3 untuk masing-masing dimensi. Ini menunjukkan bahwa kesehatan, pendidikan, dan standar hidup berkontribusi setara terhadap pembangunan manusia, artinya tidak ada yang dianggap lebih penting daripada yang lain.

Biasanya dalam menghitung indeks digambarkan dalam bentuk persen (%), sehingga hasil yang akan didapat akan dikalikan dengan 100%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri adalah sebuah pengukuran atau indikator yang berguna untuk mengetahui hasil dan upaya dalam bidang pembangunan di suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia sendiri menurut UNDP adalah pengukuran capaian pembangunan manusia berlandaskan selumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen-komponen tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut.

2.3.1 Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, ada berbagai macam faktor yang memengaruhinya, seperti kondisi lingkungan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Namun utamanya dihitung dari Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (Alviani dkk., 2021). Tetapi masih ada indikator-indikator lainnya seperti tersedianya pelayanan kesehatan, mortalitas, morbiditas dan hari sakit. Angka Harapan Hidup menggambarkan rata-rata perkiraan jumlah tahun bayi yang baru akan lahir dengan berpedoman pada angka kematian dalam tahun tersebut. Dan mengasumsikan jika kematian pada tahun tersebut merupakan umur kira-kira bayi yang akan lahir pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup sendiri dipilih karena mencerminkan berbagai macam faktor yang memengaruhi kesehatan, contohnya gizi dan nutrisi, lingkungan yang sehat, tingkat penyakit menular dan tidak menular dan akses terhadap air bersih (Devikartini & Asmara, 2024). Selain itu, harapan hidup lebih mudah dianalisis di berbagai wilayah dan negara.

Implikasi terhadap Angka Harapan Hidup yang tinggi yaitu pertama, kualitas hidup meningkat, penduduk dengan harapan hidup tinggi biasanya cenderung punya kualitas hidup yang bagus karena mereka dapat hidup lebih sehat dan kemungkinan hidup lebih lama. Kedua, yaitu produktivitas meningkat, penduduk yang sehat cenderung lebih produktif dan memiliki dampak yang besar bagi pembangunan suatu negara (Febiola dkk., 2022). Ketiga, negara-negara dengan harapan hidup yang lebih tinggi cenderung mengalokasikan sumber daya yang besar untuk pendidikan, karena harapan hidup yang lebih panjang sering kali berkorelasi dengan masa kerja yang lebih panjang, yang mendorong investasi dalam sumber daya manusia dan juga kehidupan yang lebih sehat mereka akan memanfaatkan pendidikan tersebut dengan baik.

2.3.2 Pendidikan

Pendidikan di suatu wilayah merupakan komitmen jangka panjang untuk mengamankan pekerjaan dengan gaji yang baik yang dapat meningkatkan standar hidup. Menurut Oemar Hamalik (2001) mengatakan jika pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka menginginkan siswa agar bisa beradaptasi dengan sebaik mungkin dengan lingkungan, dengan demikian akan memunculkan perubahan didalam dirinya yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan peran yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu menurut Siagan (2006) mengatakan bahwa pendidikan merupakan keseluruhan proses teknik dan metode belajar mengajar yang menginginkan adanya sebuah pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan mengikuti aturan yang ada. Berdasarkan alasan yang disebutkan di atas, jelas bahwa pendidikan sangat terkait dengan pembangunan. Pendidikan merupakan upaya pribadi yang meningkatkan modal manusia, yang pada gilirannya mendorong pembangunan. Sebaliknya, pembangunan merupakan upaya manusia yang mendukung aspek pendidikan. Pendidikan sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tertulis tujuan pembangunan nasional, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum (Mudana & Purbadharmaja, 2024).

Pendidikan merupakan proses transformatif yang memungkinkan individu sebagai agen dan penerima untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengingat peran pentingnya dalam peningkatan sumber daya manusia, pembangunan pendidikan mencakup sistem pendidikan formal dan informal (Nugraheni & Sudarwati, 2021). Metrik yang digunakan dalam sektor pendidikan meliputi Tahun Sekolah yang Diharapkan (HLS) dan Tahun Sekolah Rata-rata (RLS) (Putra & Ekasari, 2023). Pertama, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), angka ini memperlihatkan seberapa lamanya masa sekolah yang diharapkan bisa dicapai oleh anak-anak dalam usia tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan peluang anak-anak berusia 7 tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan durasi pendidikan yang biasanya diselesaikan oleh individu berusia 25 tahun ke atas.

2.3.3 Standar hidup

Dalam mengukur taraf hidup seseorang, terdapat manfaat untuk menilai kemampuan masyarakat dalam

mendapatkan sumber daya ekonomi. Seperti dalam IPM sendiri terdapat komponen standar hidup yang indikatornya adalah Pengeluaran Per Kapita per tahun (S. R. Hasibuan dkk., 2023), yang berasal dari data SUSENAS, dihitung di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indikator ini juga mencerminkan status kesejahteraan penduduk, yang menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi berdampak pada masyarakat. pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Asmawani & Pangidoan, 2021). Indikator ini juga mengungkapkan kapasitas individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk standar hidup yang layak (Hanifah & Rachmawati, 2023).

Ketiga elemen ini penting karena saling terkait dengan banyak faktor. Misalnya, harapan hidup merupakan ukuran utama kesehatan. Angka literasi dan rata-rata tahun sekolah merupakan indikator penting untuk pendidikan. Saat menilai standar hidup, faktor-faktor seperti daya beli menjadi relevan. Proses pembangunan manusia menunjukkan perkembangan ekonomi yang baik, meskipun pencapaian ini tidak tergantung pada kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Untuk melihat pembangunan ekonomi, modal manusia harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita serta kebutuhan masyarakat untuk standar kehidupan yang layak, seperti pendidikan dan kesehatan (Abie Rachman Muhamad & Dewi Rahmi, 2023).

2.4 Hubungan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan pendidikan seseorang kebanyakan dihubungkan dengan pendapatan yang tinggi dalam karirnya. Apabila pendapatan yang tinggi menggambarkan produktifitas, semakin banyak orang mengakses pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, ditambah dengan produktivitas yang tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional pun terdorong. Kesehatan juga memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Kesehatan memiliki pengaruh dalam pendapatan karena akan dipengaruhi oleh kesehatan penduduk dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kualitas kesehatan juga memiliki pengaruh untuk peningkatan pendidikan masyarakat dan pengembangan skill masyarakat yang akan memengaruhi pendapatan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di Sumatera Selatan maupun Nasional (Putra & Ekasari, 2023).

Penelitian dari Reza Dwi Darma, Fivien Muslihatinningsih & Moh Adenan yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM Dan Dependency Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”, penelitian ini mendapatkan dengan temuan yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki Pengaruh terbalik terhadap kemiskinan, terutama karena menyertakan indikator kesehatan dan pendidikan yang cara mendapatkannya memerlukan akses, sehingga ketika masyarakat telah mendapatkan akses tersebut, maka faktor personal dan fisik meningkat faktor sosial dan budaya akan didapatkan dengan lebih baik (Darma dkk., 2024).

2.5 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Sholikhah (2022) dampak buruk pengangguran adalah penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan standar hidup individu. Ketika kesejahteraan masyarakat memburuk karena meningkatnya pengangguran, hal itu dapat mendorong banyak orang jatuh miskin karena kurangnya pendapatan. Pengangguran yang terus-menerus dapat menyebabkan keresahan politik dan sosial, yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (L. Sari dkk., 2022). Banyak pekerja yang menolak tawaran kerja karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan harapan sehingga memperparah pengangguran. Namun, sebagian individu ditopang oleh anggota keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga memungkinkan mereka untuk tetap berpenghasilan di atas garis kemiskinan meskipun tidak bekerja (Vania Grace Sianturi dkk., 2021). Sehingga, bisa disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka akan memengaruhi kemiskinan yang merupakan salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu komponen standar hidup yang berisi tentang pendapatan masyarakat

. Penelitian dari Endang & Moh. Saiful Anam yang berjudul “Menuju Ibu Kota Baru: Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur”, penelitian ini mendapatkan dengan temuan yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Kalimantan Timur., yang artinya bahwa pengurangan tingkat pengangguran merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan IPM di daerah tersebut. (Anam, 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono “Penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan ini berlandaskan filsafat positivisme, yang mengutamakan data objektif dan terukur”. Penelitian ini melibatkan tiga variabel, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Kemiskinan, dengan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (time series) dan lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (data cross-sectional). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data cross-sectional dan data time-series. Data panel, atau gabungan data time-

series/cross-section adalah istilah yang digunakan dalam ekonometrika dan statistik untuk menunjukkan kumpulan data yang berisi pengamatan berulang pada pilihan variabel dari serangkaian unit pengamatan. Ada beberapa keuntungan data panel dibandingkan dengan data cross-sectional atau time-series murni. Ada dua keuntungan, yaitu kemampuan untuk mempelajari hubungan dinamis dan memodelkan perbedaan, atau heterogenitas, di antara subjek. Tentu saja, data panel lebih kompleks daripada data cross-sectional atau time-series murni. Kelemahannya adalah kesulitan dalam merancang skema pengambilan sampel. Metodologi ini akan menggambarkan sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, sebagaimana yang direpresentasikan oleh angka-angka statistik.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bervariasi menurut waktu (2017–2024) dan lokasi geografis (termasuk kabupaten/kota di Sumatera Selatan). Untuk memudahkan analisis perubahan selama kurun waktu tertentu untuk setiap wilayah, data panel mengintegrasikan unsur-unsur data time series dan cross-sectional. Mengandalkan data cross-sectional atau time-series saja akan menghasilkan estimasi regresi yang kurang tepat, sementara data panel meningkatkan jumlah observasi dan menawarkan temuan yang lebih akurat. Hasil regresi data panel bermanfaat untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian. Hasil analisisnya menunjukkan perbedaan antar waktu dan wilayah, yang memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih akurat. Ini penting bagi pemerintah daerah untuk menargetkan kebijakan ekonomi yang relevan untuk mengurangi kemiskinan di semua kabupaten dan kota.

3.1 Metode Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel, di mana variabel statistik digunakan untuk mengidentifikasi dampak setiap variabel. Model regresi data panel adalah sebagai berikut (Napitupulu, dkk., 2021(Napitupulu, dkk., 2021);

$$IPMit = a + \beta_1TKit + \beta_2TPTit + \alpha_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

a = Konstanta

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

TK = Tingkat Kemiskinan

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

β = Koefisien regresi model

ϵ = Std Error

α_i = Model pada observasi ke-i

i = Cross-section (Kabupaten/Kota)

t = Time series (tahun 2017-2024)

3.3.1 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, aplikasi Eviews versi 12 adalah aplikasi yang akan menganalisis data panel ini. Dalam regresi data panel, pemilihan model yang tepat sangat penting. Model yang digunakan untuk menganalisis data panel meliputi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)". Pemilihan model ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penelitian ini.

1. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan pendekatan paling sederhana untuk mengestimasi data panel, menggabungkan data time-series dan cross-sectional tanpa memperhitungkan perbedaan individu atau temporal. Parameternya diduga menggunakan metode asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS) (Mobonggi dkk., 2022).

2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa variasi antar individu dapat dijelaskan oleh perbedaan intersep. Model ini menggunakan variabel dummy untuk mengestimasi data panel dan menyesuaikan variasi intersep. Untuk metode fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan tanpa pembobotan (no weight) atau Least Square Dummy Variable (LSDV), atau dengan pembobotan (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Untuk membuat interpretasi data lebih dinamis, model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel (Tanjung dkk., 2022).

3. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) memperkirakan data panel dengan mengasumsikan bahwa istilah galat berkorelasi lintas waktu dan individu. REM berasal dari istilah gangguan, yang diperlakukan sebagai variabel global. Random Effect Model membantu menyelesaikan persoalan yang disebabkan oleh Fixed Effect Model. Untuk data panel, Fixed Effect Model dengan variabel dummy menimbulkan masalah derajat kebebasan yang hilang dari model (Hutagalung & Darnius, 2022).

Uji Hausman Menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel independen dan efek individual yang tidak terobservasi. Jika ada korelasi, model Fixed Effects lebih cocok karena mampu menangani masalah tersebut, sedangkan jika tidak ada korelasi, model Random Effects lebih efisien.

3.2 Pemilihan model yang sesuai

Untuk menentukan model yang tepat untuk penelitian ini, beberapa pengujian diperlukan. Pengujian Chow, Hausman, dan Lagrange-Multiplier (LM) sangat penting untuk memilih model yang paling sesuai (Napitupulu, dkk., 2021). Uji beserta fungsi tersebut adalah.

1. Uji Chow

Pengujian Chow mengidentifikasi model yang lebih baik untuk penelitian ini: Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Uji Chow menentukan apakah data panel menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok atau individu. Model Fixed Effects akan lebih baik digunakan daripada Common Effect Model (CEM) jika hasil uji menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jika nilai-p dari pengujian Chow melebihi 0,05, Common Effect Model (CEM) adalah model yang lebih disukai. Jika nilai-p di bawah 0,05, Fixed Effect Model (FEM) dianggap sebagai pendekatan yang optimal, diikuti oleh pengujian Hausman untuk menentukan apakah FEM atau Random Effect Model (REM) lebih tepat.

2. Uji Hausman

Pengujian Chow juga membantu menentukan model yang lebih unggul antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Uji Hausman memeriksa apakah ada hubungan antara variabel independen dan efek individu yang tidak terlihat. Jika ada korelasi, model Fixed Effects lebih baik karena mereka dapat menangani masalah tersebut. Namun, jika tidak ada korelasi, Random Effects lebih efisien. Jika nilai-p dari uji Chow kurang dari 0,05, Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik untuk penelitian ini. Jika nilai-p melebihi 0,05, Random Effect Model (REM) lebih tepat, dan pengujian selanjutnya adalah uji Lagrange-Multiplier untuk memutuskan antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM).

3. Uji Lagrange-Multiplier

Uji Chow membantu mengidentifikasi model yang lebih baik antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM). Uji Lagrange-Multiplier menilai keberadaan efek acak. Jika terdapat variasi yang nyata antara individu atau kelompok, Random Effect Model (REM) mungkin lebih cocok. Jika nilai-p di bawah 0,05, Random Effect Model (REM) adalah model yang lebih disukai. Jika nilai-p melebihi 0,05, Common Effect Model (CEM) lebih cocok untuk penelitian ini.

3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas memeriksa apakah residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Uji ini penting karena uji-t dan uji-F mengasumsikan residual yang terdistribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, uji statistik mungkin tidak dapat diandalkan, terutama dengan ukuran sampel yang kecil. Dalam data panel. Uji normalitas pada data panel hanya digunakan jika jumlah observasi/sampel kurang dari 30, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah eror term mendekati distribusi normal. Apabila jumlah observasi/sampel lebih dari 30 maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling eror term mendekati normal (Naharin dkk., 2023). Uji normalitas hanya berlaku jika model yang dipilih merupakan model Random Effect Model (REM).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memeriksa korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Uji ini membantu mengidentifikasi apakah ada variabel independen yang berkorelasi tinggi dengan variabel lainnya. Jika koefisien korelasi kurang dari 0,85, multikolinieritas tidak ada (Setiawan dkk., 2022). Pengujian multikolinieritas dilakukan hanya jika terdapat beberapa variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mengevaluasi apakah varians variabel dependen tetap konsisten di seluruh variabel independen. Jika heteroskedastisitas ada, hal itu dapat menyebabkan varians koefisien regresi minimal. Jika

nilai signifikansi di bawah 0,05, heteroskedastisitas ada; jika tidak, tidak ada. Uji ini dilakukan jika model tersebut adalah Fixed Effect Model (FEM) atau Common Effect Model (CEM).

4. Hasil Penelitian.

4.1 Uji Chow

Nilai yang didapat pada Prob. adalah 0,0000 dimana $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang didapat adalah model Fixed Effect Model (FEM).

4.2 Uji Hausman

Nilai yang didapat pada Prob. adalah 0,0000 dimana $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang didapat adalah model Fixed Effect Model (FEM).

4.3 Uji Lagrange-Multiplier

Nilai yang didapat pada Breusch-Pagan pada Cross-Section adalah 0,0000 dimana $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang didapat adalah model Common Effects Model (CEM).

4.4 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas maka didapatkanlah nilai korelasi antar variabel bebas sebesar 0.05649079253942744 dari hubungan Antara Tingkat Kemiskinan dan TPT, nilai ini lebih kecil dari 0,85 sehingga bisa disimpulkan bahwa uji ini lolos dari uji multikolinieritas (Setiawan dkk., 2022).

4.5 Uji Heteroskedisitas

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedisitas maka didapatkanlah nilai 0.0781 dari Prob. Tingkat Kemiskinan dan nilai 0.9525 dari prob. TPT, nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa uji ini lolos dari Uji Heteroskedisitas karena nilainya diatas 0,05.

Berdasarkan Uji-uji tersebut maka bisa didapatkan bahwa model data panel yang tepat untuk digunakan adalah “Fixed Effect Model (FEM)”. Berdasarkan Model yang didapatkan yaitu model Fixed Effect Model (FEM), maka uji asumsi klasik yang dilakukan adalah Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedisitas. Berdasarkan hasil penelitian, Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan model lain (Common Effect Model/CEM atau Random Effect Model/REM) karena beberapa alasan:

- Uji Chow digunakan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas (p-value) $0,0000 < 0,05$, yang berarti FEM lebih cocok dibandingkan CEM.
- Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, yang berarti FEM lebih sesuai dibandingkan REM.
- Penelitian ini menggunakan data panel dengan kombinasi data time-series (2017–2024) dan cross-sectional (kabupaten/kota di Sumatera Selatan). Model FEM lebih tepat untuk menangkap perbedaan karakteristik antar wilayah yang tidak bisa dijelaskan oleh CEM atau REM.
- FEM memungkinkan intersep berbeda untuk setiap kabupaten/kota, yang berarti model ini dapat menangkap faktor-faktor spesifik di setiap wilayah. Model ini lebih akurat dalam menganalisis dampak tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena mempertimbangkan karakteristik unik masing-masing daerah.
- Setelah FEM dipilih, dilakukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius, sehingga model FEM tetap valid.

Dengan demikian, pemilihan Fixed Effect Model (FEM) adalah yang paling tepat untuk penelitian ini karena dapat menangkap variasi antar kabupaten/kota dan memberikan hasil estimasi yang lebih akurat dibandingkan CEM atau REM.

4.6 Uji Statistik F (Simultan)

Nilai F tabel 2,672182432 jauh lebih rendah daripada nilai F statistik 216.8672. Ini menunjukkan bahwa variasi yang jauh lebih besar dalam data yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang mencakup variabel TPT dan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Dengan kata lain, model regresi yang penulis gunakan sangat baik untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi satu sama

lain. Tingkat signifikansi yang biasa digunakan (biasanya 0,05) jauh lebih besar daripada skor signifikansi sebesar 0,000000, yang sangat mendekati nol.

4.7 Uji Statistik *t* (Parsial)

Hasil uji *t* dari Tingkat Kemiskinan menunjukkan angka 13,88445 dengan posisi negatif. Angka ini lebih besar dari *t* tabel yaitu 1,977825758. Dan nilai sig. 0,0000<0,05. Yang artinya bisa disimpulkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara negatif secara tidak signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil uji *t* dari Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka 1.208435 dengan posisi negatif. Angka ini lebih kecil dari *t* tabel yaitu 1,977825758. Dan nilai sig. 0,2293>0,05. Yang artinya bisa disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh secara signifikan dengan Y Indeks Pembangunan Manusia.

4.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R-squared berapa pada angka 0.966423, atau jika dipersen kan sebesar 96,6423%. Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh sebesar 96,6423%. Sisanya yaitu 3,3577% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5. Pembahasan

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 hingga 2024. Menggunakan model Fixed Effect (FEM) pada data panel yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan, penelitian ini menemukan beberapa hasil penting:

Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM. Ini berarti bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai IPM yang lebih rendah. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemiskinan menghambat akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi IPM. Secara parsial, TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Meskipun ada hubungan negatif, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan dalam model yang digunakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model, seperti kualitas pekerjaan atau dukungan keluarga. Secara simultan, tingkat kemiskinan dan TPT secara signifikan mempengaruhi IPM. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini bersama-sama memainkan peran penting dalam menentukan IPM di Sumatera Selatan.

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan IPM di Sumatera Selatan. Pengaruh negatif yang signifikan dari kemiskinan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan harus terus ditingkatkan. Program-program yang berfokus pada peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin sangat diperlukan. Kurangnya pengaruh signifikan dari TPT secara parsial mungkin mengindikasikan bahwa pengangguran saja tidak cukup untuk menjelaskan variasi dalam IPM. Faktor-faktor lain seperti kualitas pekerjaan, upah yang layak, dan dukungan sosial mungkin memainkan peran yang lebih besar. Selain itu, data TPT mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengangguran yang sebenarnya di lapangan, terutama di sektor informal.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan ini, beberapa implikasi kebijakan dapat diusulkan:

1. **Pengurangan Kemiskinan:** Pemerintah daerah perlu memperkuat program-program pengentasan kemiskinan yang ada dan mengembangkan program baru yang lebih efektif. Ini termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.
2. **Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas:** Meskipun TPT secara parsial tidak signifikan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan tetap penting. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan harus menjadi prioritas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM.

4. **Koordinasi Antar Sektor:** Pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai sektor. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan program di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial saling mendukung dan terintegrasi.
5. **Penelitian Lebih Lanjut:** Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor lain yang mempengaruhi IPM, seperti kualitas pekerjaan, dukungan sosial, dan faktor-faktor budaya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan IPM di Sumatera Selatan.

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan IPM di Sumatera Selatan dapat terus meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Kesimpulan

Hasil uji F menunjukkan nilai F statistik sebesar 216,8672, yang jauh lebih besar dari nilai F tabel 2,6722. Ini menunjukkan bahwa, dari 2017 hingga 2024, IPM di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat secara efektif menjelaskan bagaimana variabel independen dan variabel dependen berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, variabel Tingkat Kemiskinan (X1) memiliki nilai uji t sebesar -13,88445, yang lebih besar secara absolut dibandingkan dengan nilai t tabel 1,9778. Nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM, yang berarti bahwa nilai IPM yang dicapai lebih rendah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Namun, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial; hasil uji t untuk variabel ini menunjukkan nilai -1,208435, yang lebih rendah dari nilai t tabel 1,9778. Dengan kata lain, meskipun ada hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan IPM, hubungan ini tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan dalam model penerapan.

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Selatan dari tahun 2017 hingga 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki dampak negatif signifikan terhadap IPM, sementara TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menggunakan data panel dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan dan menerapkan model Fixed Effect. Penelitian menurut (Anam, 2024) pun juga menjelaskan jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa keterbatasan penelitian ini meliputi periode data yang terbatas (2017-2024), penggunaan hanya dua variabel independen (tingkat kemiskinan dan TPT), serta metodologi kuantitatif yang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, memasukkan variabel lain yang relevan, dan mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Berdasarkan temuan ini, pemerintah daerah disarankan untuk terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program yang meningkatkan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

7. Daftar Pustaka

- [1] Abda, S. A., & Cahyono, H. (2022). Apakah IPM, Pengangguran, Dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh Dalam Menurunkan Kemiskinan di Kota Surabaya? *Independent: Journal of Economics*, 2(1), 61–76. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.43769>
- [2] Abie Rachman Muhamad & Dewi Rahmi. (2023). Pengaruh Teknologi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat 2007-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1924>
- [3] Alviani, L. O., Kurniati, E., & Badruzzaman, F. H. (2021). Penggunaan Regresi Data Panel pada Analisis Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Matematika*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.29313/jrm.v1i2.373>
- [4] Anam, M. S. (2024). Menuju Ibu Kota Baru: Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 652–661.
- [5] Ardian, R., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA*. 1(3), 190–198.
- [6] Asmawani, A., & Pangidoan, D. (2021). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

- Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir serta Serdang Berdagai. *Jurnal Sains Ekonomi*, 2(1), 96–109.
- [7] BPS. (2025a, Januari 31). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan*. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA5IzI=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-per-kabupaten-kota-se-sumatera-selatan.html>
- [8] BPS. (2025b, Januari 31). *Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan*. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA0IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- [9] BPS. (2025c, Januari 31). *Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan*.
- [10] Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 147–161. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>
- [11] Darma, R. D., Muslihatinningsih, F., & Adenan, Moh. (2024). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM DAN DEPENDENCY RATIO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekuilibrium*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.19184/jek.v8i1.46023>
- [12] Devikartini, S. A., & Asmara, K. (2024). Analisis Angka Harapan Hidup, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Serang. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 8(2), 769–778.
- [13] Eka Fatimah, Evilia Gunawan, Iqbal Hasyim, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2013-2022. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3), 122–131. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.916>
- [14] Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2022). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19979>
- [15] Febiola, A., Lusia, R. A., & Jaya, Y. S. (2022). PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA STUNTING TERHADAP TINGKAT HARAPAN HIDUP PADA KABUPATEN BANGKA BARAT. *Proceedings of National Colloquium Research and Community Service*, 6, 75–79.
- [16] Gaza, M. H. A., Ridwansyah, R., & Malik, A. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2023 (Studi Pada Provinsi Lampung). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(12), 99–113.
- [17] Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 304–317. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7137>
- [18] Hasibuan, L. S. (2023). ANALISIS PENGARUH IPM, INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. 8(1).
- [19] Hasibuan, S. R., Harahap, I., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), 272–285. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.4023>
- [20] Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: IPM Sumatera Utara Periode 2014 – 2020). *FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422>
- [21] Kesumadewi, E., & Aprilyani, A. (2024). Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–15. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.360>
- [22] Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BELU. 2(07), 60–83.
- [23] Marlina, L. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Miskin Dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bungo 2014-2021. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 147–152.
- [24] Maulana, B. F., Farhan, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2019-202. *Ebismen Jurnal Ekonomi, Bisnis dan*

Manajemen, 1(1), 123–134.

- [25] Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 12–24. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>
- [26] Mobonggi, I. D., Achmad, N., Resmawan, R., & Hasan, I. K. (2022). ANALISIS REGRESI DATA PANEL DENGAN PENDEKATAN COMMON EFFECT MODEL DAN FIXED EFFECT MODEL PADA KASUS PRODUKSI TANAMAN JAGUNG. *Interval: Jurnal Ilmiah Matematika*, 2(2), 52–67. <https://doi.org/10.33751/interval.v2i2.6516>
- [27] Mudana, I. W. E., & Purbadharmaja, I. B. P. (2024). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 9601–9612.
- [28] Naharin, S. N., Robby, R. R., & Akbarita, R. (2023). Model Faktor Yang Memengaruhi Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(2), 441. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1281>
- [29] Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. Madenatera.
- [30] Nugraheni, H. R., & Sudarwati, N. (2021). Kontribusi Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.37478/jpe.v6i1.898>
- [31] Nur, M. T., Khoirotunnisa, D., Widyaningsih, W., & Nohe, D. A. (2022). REGRESI DATA PANEL UNTUK MEMODELKAN PERSENTASE KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, 2, 108–121.
- [32] Pasaribu, R. L., Tampubolon, D., & Hamidi, W. (2022). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH, DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI RIAU PERIODE 2011-2020. *Jepp Jurnal ekonomi pembangunan dan pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya*, 2(2), 99–110.
- [33] Putra, D. J., & Ekasari, A. (2023). Analisis Kontribusi Indikator Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JOURNAL ON TEACHER EDUCATION*, 4(3), 748–755.
- [34] Rachmatullah, R., Endaryanto, T., & Affandi, M. I. (2021). Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGS) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *TATALOKA*, 23(2), 239–251. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.239-251>
- [35] Ramadhani, N., & Utomo, Y. P. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2020. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2).
- [36] Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- [37] Sari, L., Yovita, I., & Nurjannah, N. (2022). ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2002-2021. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 567–574.
- [38] Sari, Y. A. (2021). PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>
- [39] Setiawan, D., Udjiyanto, D. W., & Syari'udin, A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI DUA ZONA WILAYAH INDONESIA (WIB & WITA) TAHUN 2014-2020 MENGGUNAKAN MODEL EKONOMETRIKA DATA PANEL DINAMIS DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED METHOD OF MOMENT ARELLANO-BOND Oleh : 11(1), 361–367.
- [40] Sholikah, N. R. (2022). Pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka serta pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10(3), 247–253.
- [41] Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>

- [42] Tanjung, A. A., Syafii, M., Tarigan, S. B., & Harahap, W. G. (2022). Analisis Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Model Data Panel. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 567–575. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2223>
- [43] Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- [44] Veronika, S., & A. Y., M. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 139–146.